

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM BATU BARA DI KABUPATEN TANAH
LAUT BERBASIS MANAJEMEN STRATEGIK DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Agus Purnomo

Fakultas Studi Islam Uniska MAB / *guspur80@gmail.com*

Ibrahim Hasan

Fakultas Studi Islam Uniska MAB / *ibrahimhasan497@gmail.com*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sumber daya batubara di Kabupaten Tanah Laut Berbasis Manajemen Strategik dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menemukan perspektif baru dalam penelitian analisis strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batubara tahun 2016 berbasis manajemen strategik dalam perspektif ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian campuran (*mixed methodology*). dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui potensi bahan galian, produksi batu bara per tahun, dsb. Metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kendala atau dampak dari pengelolaan sumber daya alam di kabupaten tanah laut untuk mengetahui strategi yang harus digunakan, hal tersebut digali melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Melalui penelitian ini diperoleh, bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Energi dan sumber daya mineral maka strategi pemerintah yang digunakan yaitu dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta penggunaan teknologi yang modern untuk memanfaatkan sumber daya dan cadangan batubara yang dimiliki.

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah, Manajemen Strategik, pengelolaan, strategi Pemerintah daerah

Abstract:

This research is motivated by the management of coal resources in Tanah Laut districts based on strategic management in the islamic economic perspective. The purpose of this study is to identify, examine, and find new perspectives in research analysis of government strategies in the management of coal resources 2016 based on strategic management in the economi perspective of islam.

Research method used in this research is kind of mixed research. In this study researchers used quantitative data to determine the potential of minerals, coal production per year, and so on. The qualitative method in this study is intended to describe the constraints or impacts of natural resource management in Tanah Laut regency districts to know which strategies to use, it is explored through observation, interview, and documentation.

Through this research, it is known that, based on the results of interviews to the energy and mineral resources department, the government's strategy is to utilize the human resources of quality and professional and the use of modern technology to utilize resources and reserves of their coal.

Keyword:

Sharia Economic, Management Strategic, Management, Strategy of local government

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya terbesar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya alam dan energi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hidup orang banyak. Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik (logam) tersebar di beberapa lokasi di Indonesia antara lain bagian barat, tengah dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan, emas, batubara, di Sumatera, dan mineral lainnya yang masih tersebar diberbagai wilayah dan tempat.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik serta terencana akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Menurut Gatot Suparmono, Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran demokrasi ekonomi secara berkelanjutan.²

Bahan galian tambang batubara banyak terdapat di negara Indonesia yang mempunyai letak geografis yang strategis yang terletak pada 3 tumbukan lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik yang melahirkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang salah satunya adalah tambang batubara. Tambang batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.³

Kegiatan usaha pertambangan batubara apabila dilakukan secara besar-besaran tanpa memperdulikan kelestarian hutan maka akan menimbulkan kerusakan hutan atau deforestasi hutan yang tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan banjir dan terganggunya sumber daya alam hayati yang ada di dalam hutan dan akan terganggunya perekonomian dan kesehatan masyarakat disekitarnya khususnya dan bangsa pada umumnya.

Provinsi kalimantan selatan merupakan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam non hayati. oleh karena itu, kegiatan penambangan bahan tambang di kalimantan selatan merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang pengelolaannya tersebar di beberapa

¹Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral Batubara di Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,), hlm. 1.

²Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³ Pasal I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

kabupaten, dimana potensi alam yang dimiliki untuk kegiatan pertambangan. Salah satunya adalah batu bara kalimantan selatan. data tahun 2013 menyatakan sebesar 162.952.196 ton, yang terdiri dari produksi batu bara PKP2B sebesar 101.234.960 ton dan produksi batu bara IUP sebesar 61.717.236 ton.⁴ Salah satu lokasi endapan batubara di kalimantan selatan berada di kabupaten tanah laut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan peneltian yang berjudul “Analisis strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya Batubara di kabupaten tanah laut berbasis Manajemen Strategik dalam perspektif Ekonomi Syariah”

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batu bara tahun 2016 berbasis manajemen strategik dalam perspektif Ekonomi Syariah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menemukan perspektif barudalam penelitian analisis strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya batubara tahun 2016 berbasis manajemen strategik dalam perspektif ekonomi syariah.

Signifikansi Masalah

Dari penelitian ini tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi atas kinerja perusahaan pertambangan selama ini untuk pengembangan kedepan.

2. Manfaat teoritis

Temuan yang akan didapatkan dalam peneltian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan

⁴Data dari dinas energi dan sumber daya mineral tahun 2013

strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam batubara perspektif manajemen strategik.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung peneliti lakukan di Dinas Pertambangan & Energi Provinsi kal-sel. Metode yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. Yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel sesuai dengan kebutuhan data.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan tentang dari sifat-sifat dari suatu keadaan dan memaparkan uraian (data dan informasi) yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan dan pustaka terhadap objek yang diteliti dalam hal ini adalah Dinas pertambangan dan energi Provinsi kal-sel.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan (batu bara) di kabupaten tanah laut ditinjau dari perspektif Manajemen Strategik.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber daya Mineral yang beralamat jl. Pangeran suriansyah no.7 banjarbaru, Kalimantan selatan.

5. Data dan Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu Dinas Provinsi pertambangan dan energi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik pengumpulan data

Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog wawancara dengan responden. Dalam hal ini adalah wawancara kepada bagian Minerba Dinas provinsi pertambangan dan energi kalsel.

Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh

peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan melalui penggunaan panca indra. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, pengamatan juga harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang berasal dari pengelola pasar atau dinas terkait.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis perusahaan selalu berkaitan erat dengan pengembangan misi, visi, tujuan, strategi serta kebijakan perusahaan. Oleh karenanya perencanaan yang strategis sangat memerlukan analisa-analisa dari masing-masing SWOT ini (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) di lingkungan perusahaan saat ini.

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya. Alasan mengapa menggunakan analisis SWOT dalam menganalisis data yaitu analisis SWOT lebih tepat digunakan karena sesuai dengan penelitian ini.

Temuan dan Pembahasan Penelitian

Profil Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah laut merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 3°30'33" – 4°11'38" LS dan 114°30'20" – 115°23'31" BT, dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Pelaihari yang berjarak sekitar 60 Km dari Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara administrasi, Kabupaten Tanah laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 135 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.631,35 Km² atau 363.135 Ha. Nama-nama kecamatan adalah:

- 1) Kecamatan Panyipatan
- 2) Kecamatan Takisung
- 3) Kecamatan Bati-Bati

- 4) Kecamatan Kurau
- 5) Kecamatan Bumi Makmur
- 6) Kecamatan Batu Ampar
- 7) Kecamatan Tambang Ulang
- 8) Kecamatan Pelaihari
- 9) Kecamatan Bajuin
- 10) Kecamatan Jorong
- 11) Kecamatan Kintap.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Banjar Baru
- Sebelah Timur : Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Laut Jawa

Sedangkan jarak Ibu kota Kabupaten Tanah Laut dengan Ibukota Provinsi adalah sejauh \pm 113 km sementara Jarak Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan Kecamatan

Menurut bentuk fisiografi lahannya, Kabupaten Tanah Laut terbagi atas 3 jenis yaitu :

1. Wilayah Pesisir, merupakan daerah tepi pantai Laut Jawa yang membentang dibatas selatan dan timur Kabupaten, terdapat pada Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur.
2. Wilayah dataran rawa, umumnya terdapat pada sisi barat dan utara wilayah kabupaten, yang sebagian besar merupakan termasuk rawa yang tergenang sepanjang tahun, khususnya terdapat pada Kecamatan Bati-Bati. Sementara itu daerah penyebaran rawa lainnya terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, Takisung dan Pelaihari.
3. Wilayah perbukitan, yaitu berupa daerah dataran tinggi dan bergelombang atau berbukit, terdapat pada bagian tengah kabupaten. Untuk daerah bergelombang/berbukit terdapat di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Pelaihari, Kurau, Jorong dan Panyipatan. Sementara untuk daerah berbukit hingga bergunung terdapat di wilayah Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap.

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat atau elevasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0 - 7 meter di atas permukaan laut (m dpl), 7 - 25 m dpl, 25 - 100 m dpl, 10 - 500 m dpl, 500 - 1000 m dpl, dan >1.000 m dpl. Kelas ketinggian lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 m dpl, yaitu mencapai 58.240

Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 m dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0 - 7 mdpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian >500 m dpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-Bati. Secara administrasi, Kabupaten Tanah laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 135 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.631,35 Km² atau 363.135 Ha.

Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Di Kabupaten Tanah Laut Berbasis Manajemen Strategik Dalam Perspektif Eknomi Syariah

Kabupaten tanah laut merupakan daerah yang sangat kaya akan potensi, meliputi potensi sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, karet, dan yang paling utama yang berpotensi dalam bidang pertambangan yaitu melimpahnya sumber daya alam batubara. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam batubara merupakan suatu langkah strategis yang dapat berdaya guna sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergitas pemerintah daerah dengan perusahaan tambang, pemberdayaan masyarakat dan hasil akhir yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat.

Langkah selanjutnya dari strategi formulasi adalah pengidentifikasian peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan batubara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas pertambangan dan Energi provinsi kalimantan selatan, Proses perumusan strategi mencakup pengidentifikasian peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Dalam wawancara peneliti dengan ibu Yeni menjabat dibidang Minerba di Dinas pertambangan dan Energi provinsi kal-sel, beliau mengemukakan bahwa:

“Dalam mengelola sumber daya alam batubara yang pertama membuat rencana induk terlebih dahulu, semacam dokumen perencanaan. Seperti misalnya *Master Plan*, kemudian DED, Rencana pengelolaan limbah.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam perumusan strategi pengelolaan sumber daya alam batubara dimulai dari pembuatan rencana induk berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut dapat berupa *Master Plan*, *DED (Detail Engineering*

⁵Hasil Wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 26 april 2017

Design), Serta rencana pengelolaan limbah. Mengenai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam mengelola sumber daya alam batubara di Kabupaten Tanah Laut dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk kelemahan, kita memiliki beberapa kendala, yang pertama adalah terkendalanya oleh fakta kurang pemahamannya aparatur di daerah terhadap landasan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Kedua yaitu banyaknya penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan di daerah didasari oleh obsesi daerah yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Ketiga ialah Penetapan kebijakan yang keliru disebabkan karena Pemerintah Daerah belum berpengalaman dalam mengelola sumberdaya mineral. Sedangkan peluangnya adalah Potensi sumber daya batubara seperti lahan yang memadai. Tersedianya lembaga penyanggah dana (BUMN/BUMD, swasta,dan sebagainya).

Permintaan pasar yang cenderung meningkat terhadap bahan baku batubara. Peluang investasi, baik investasi baru maupun perluasan. Adanya permintaan dari Negara lain untuk mengekspor bahan mentah. Kemudian ancamannya, Pasti akan terjadi banyak polusi, terutama yang berasal dari udara, karena mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang beraktivitas di kawasan pertambangan akan menimbulkan pencemaran. Menipisnya persediaan batubara dalam negeri. Selanjutnya, kekuatan kita itu ada pada potensi. selain itu, Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Kabupaten tanah laut merupakan penghasil batubara yang potensial. Sebagai bahan baku untuk industri pembangkit listrik. Teknologi di bidang pertambangan sudah modern dan cukup banyak yang diterapkan di industri pertambangan dalam negeri.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diidentifikasi tentang peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan batubara di Kabupaten tanah laut, yaitu sebagai berikut:

1. Peluang
 - a. Potensi sumber daya batubara seperti lahan yang memadai.
 - b. Tersedianya lembaga penyanggah dana (BUMN/BUMD, swasta,dan sebagainya).
 - c. Permintaan pasar yang cenderung meningkat terhadap bahan baku batubara.
 - d. Peluang investasi, baik investasi baru maupun perluasan.

⁶Hasil wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 26 april 2017

- e. Adanya permintaan dari Negara lain untuk mengekspor bahan mentah.
- 2. Ancaman
 - a. Pasti akan terjadi banyak polusi, terutama yang berasal dari udara, karena mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang beraktivitas di kawasan pertambangan akan menimbulkan pencemaran.
 - b. Menipisnya persediaan batubara dalam negeri.
- 3. Kekuatan
 - a. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
 - b. Kabupaten tanah laut merupakan penghasil batubara yang potensial.
 - c. Sebagai bahan baku untuk industri pembangkit listrik.
 - d. Teknologi di bidang pertambangan sudah modern dan cukup banyak yang diterapkan di industri pertambangan dalam negeri.
- 4. Kelemahan
 - a. Terkendalanya oleh fakta kurang pemahamnya aparatur di daerah terhadap landasan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan sumberdaya mineral.
 - b. Kekurangan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dari hasil identifikasi diatas maka, telah didapat rumusan untuk menyusun strategi dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan di kabupaten Tanah Laut.

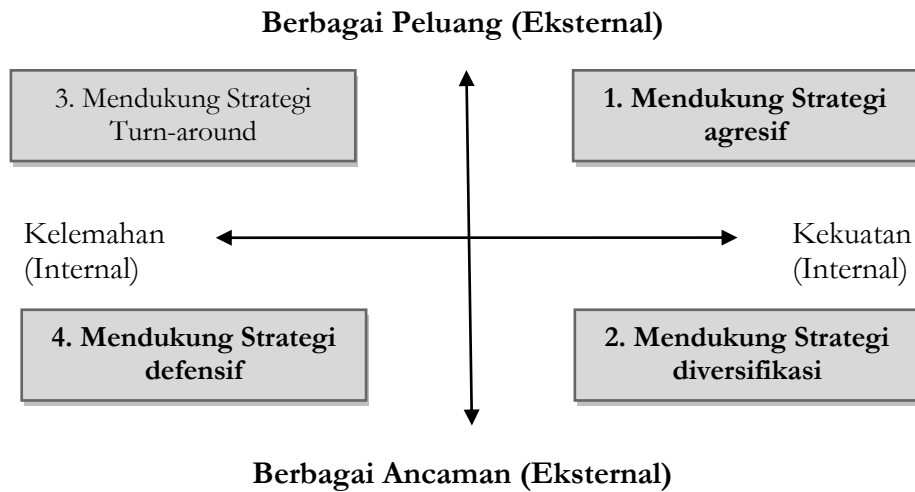
Setelah adanya penggalian sumber daya alam batubara di kabupaten Tanah laut, muncul beberapa dampak di lapangan, yaitu:

- 1. Dampak Positif
 - a. Sebagai pendapatan asli daerah (PAD)
 - b. Terdapat efek signifikan pada pendapatan masyarakat yang memiliki usaha di sekitar wilayah pertambangan.

- 2. Dampak Negatif

Selain dampak positif, dengan adanya eksplorasi sumber daya alam batubara juga membawa kontradiksi yaitu dengan timbulnya dampak negatif. Dampak tersebut adalah akan menyebabkan pemanasan global, mengakibatkan pencemaran lingkungan dari limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Berdasarkan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan internal menunjukkan bahwa peluang dan kekuatan lebih besar dibandingkan dengan ancaman dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kel-sel harus dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk merumuskan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Diagram Analisis SWOT sebagai berikut:



Gambar 4.3 Diagram Analisis SWOT

Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumber daya batubara seperti lahan yang memadai. b. Tersedianya lembaga penyanggah dana (BUMN/BUMD, swasta, dan sebagainya). c. Permintaan pasar yang cenderung meningkat terhadap bahan baku batubara. d. Peluang investasi, baik investasi baru maupun perluasan. e. Adanya permintaan dari Negara lain untuk mengekspor bahan mentah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasti akan terjadi banyak polusi, terutama yang berasal dari udara, karena mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang beraktivitas di kawasan pertambangan akan menimbulkan pencemaran. b. Menipisnya persediaan batubara dalam negeri.

*Analisis Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Batu Bara di Kabupaten Tanah Laut Berbasis Manajemen
Strategik dalam Perspektif Ekonomi Syariah*

Kelemahan	Kekuatan
<ul style="list-style-type: none"> a. terkendalanya oleh fakta kurang pahamiannya aparatur di daerah terhadap landasan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. b. Kekurangan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. b. Kabupaten tanah laut merupakan penghasil batubara yang potensial. c. Sebagai bahan baku untuk industri pembangkit listrik. d. Teknologi di bidang pertambangan sudah modern dan cukup banyak yang diterapkan di industri pertambangan dalam negeri.

Berdasarkan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta contoh diagram analisis SWOT di atas, maka analisis SWOT pengelolaan sumber daya alam pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Setelah dilakukan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta digambarkan dalam diagram analisis SWOT, peluang dan kekuatan lebih banyak, sehingga dalam analisis tersebut masuk ke dalam kuadran 1. Kuadran 1 merupakan situasi yang menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*). Strategi yang mendukung pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*) dapat terjadi karena faktor kekuatan dan peluang yang jumlahnya besar. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan tambang untuk mengoptimalkan strategi yang ada. Optimalisasi strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif berpotensi untuk mengelola sumber daya alam pertambangan batubara dengan lebih baik.

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam batubara, setelah dilakukan identifikasi SWOT, maka diperlukan cara untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada, yaitu dengan menggunakan tabel matrik SWOT:

Faktor Eksternal (EFAS/ <i>External factors analysis</i>)	Faktor Internal (IFAS/ <i>Internal factors analysis</i>)	
	<i>Strengths</i> (S)	<i>Weakness</i> (W)
<i>Opportunities</i> (O)	Dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta penggunaan teknologi yang modern untuk memanfaatkan sumber daya dan cadangan batubara yang dimiliki.	Dengan memperbaiki segala kelemahan, antara lain memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produksi yang optimal dalam rangka meraih peluang pasar yang besar.
<i>Treats</i> (T)	Dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta penggunaan teknologi yang modern untuk menghadapi ancaman persaingan yang tinggi dan menipisnya persediaan batubara dalam negeri.	Memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan menghadapi ancaman persaingan yang tinggi dan menipisnya persediaan batubara di dalam negeri.

Dari identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dengan menggunakan tabel matrik SWOT, maka didapat strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam batubara yang baik.

Berdasarkan ketiga interaksi fungsi manajemen, yaitu perencanaan strategi, melaksanakan strategi, dan evaluasi strategi, berarti terdapat 3 tahap proses dalam manajemen strategik, berikut (1) perumusan atau perencanaan strategik (*strategic planning*); (2) pelaksanaan strategik (*strategic implementing*); dan (3) pengawasan strategik (*Strategic controlling/ evaluating*).

1. Perumusan atau perencanaan strategik (*Strategic Planning*)

Tahap pertama adalah proses pembuatan perencanaan atau perumusan strategi dalam suatu perusahaan merupakan tahap awal yang mudah.⁷ Dalam arti, menentukan kegiatan yang meliputi upaya melihat kekuatan (*strenght*) apa saja yang dimiliki perusahaan bukan hanya dana yang tersedia, melainkan juga kualitas SDM dan teknologi yang dimiliki perusahaan. Di samping melihat kekuatan, perlu dilihat pula kelemahan-kelemahan (*weakness*) yang dimiliki perusahaan.

Dengan menganalisis secara strategik atas kekuatan dan kelemahan yang ada, selanjutnya dilihat peluang (*opportunity*) yang ada dan harus diraih. Biasanya, peluang tersebut diikuti oleh berbagai hambatan (*threat*). Dengan menggabungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, selanjutnya dilihat pula unsur peluang (*opportunity*) yang harus dimanfaatkan dan hambatan maka dibutuhkan perencanaan strategik perusahaan.⁸

Dalam merumuskan perencanaan strategik, unsur strategiknya meliputi berbagai analisis SWOT yang berkaitan dengan bisnis yang akan dikembangkan atau diterjuninya. Akan tetapi, agar sasaran lebih mantap maka inti perumusan strategik harus dalam bentuk pernyataan (*statement*) visi dan misi.⁹

2. Pelaksanaan strategik (*strategic Implementing*)

Tindakan berikutnya setelah direncanakan adalah melaksanakan (implementasi) dari perencanaan tersebut. tentu saja sebelum dilaksanakan, perlu membuat kegiatan untuk menggerakkan atau memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi, tidak boleh satu pun sumber daya yang diperlukan tertinggal atau terabaikan. Khususnya sumber daya manusia yang ditugaskan secara strategik dalam fungsinya masing-masing.

3. Pengawasan strategik (*Strategic Controlling/ Evaluating*)

Evaluasi strategik merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan manajemen strategik.¹⁰ Evaluasi atau pengawasan atau pengendalian berarti menilai setiap aktivitas agar seluruh kegiatan strategik sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini diperlukan, bila terjadi penyimpangan harus segera dikoreksi supaya tetap dalam jalur yang benar. Untuk produk hasil kegiatan

⁷Suryadi prawirosentono, dewi primasari. *Manajemen Strategik & pengambilan keputusan korporasi* (PT Bumi Aksara, jakarta : 2016) hlm. 9

⁸Suryadi prawirosentono, dewi primasari. *Manajemen Strategik & pengambilan keputusan korporasi* (PT Bumi Aksara, jakarta : 2016) hlm. 10

⁹*Ibid* hlm 12

¹⁰*Ibid* hlm 14

bukan saja dalam jumlah yang tepat, melainkan juga mutu yang baik sesuai dengan yang direncanakan.

Hal-hal penting dalam evaluasi stratejik meliputi:

- a. Menilai hasil kerja secara keseluruhan, agar diperoleh hasil kerja yang sesuai dengan rencana stratejik.
- b. Menilai seluruh variabel internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi rencana stratejik yang sedang dilaksanakan.
- c. Evaluasi tersebut termasuk membuat koreksi yang terjadi agar sesuai dengan rencana stratejik.

Keseluruhan hasil evaluasi termasuk faktor lain yang mungkin timbul akan menjadi *input* (masukan) untuk membuat perumusan stratejik baru dimasa yang akan datang. Sesuai dengan perubahan faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan maka perumusan stratejik pun harus dilakukan secara dinamis agar hasil kerja berkembang ke arah kemajuan.¹¹

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta atau (*corporate based management*) harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (*state based management*) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (*sustainable resources principle*).¹²

Menurut Asas sistem Ekonomi islam kepemilikan harta dalam islam pada prinsipnya adalah ditangan allah, artinya allah adalah pemilik segala sesuatu (S. An-nur 24: 33). Namun allah SWT telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, memperbanyak, serta memiliki harta tersebut (QS. Al-Hadid 57: 7)

Karena itu kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah izin *pembuat syariat* untuk *memanfaatkan z'at tertentu*. Yang dimaksud *iz'in* adalah hukum syara', *pembuat syariat* adalah allah SWT, sedangkan *z'at* adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Perlu dipahami, dalam islam hukum kepemilikan harta kekayaan tidak dibatasi ukuran kuantitas, tetapi dibatasi tatacara atau mekanisme tertentu. Hal ini sesuai fitrah manusia dan sangat proporsional.

¹¹Suryadi prawirosentono, dewi primasari. *Manajemen Stratejik & pengambilan keputusan korporasi* (PT Bumi Aksara, jakarta : 2016) hlm 15

¹² Yan S. Prasetiadi & Wahyu ichsan, 2014 *studi islam paradigma komprehensif* (Bogor: Al azhr fresh zonepublishing) hlm 290

Kepemilikan islam terbagi menjadi tiga, yakni: (1) kepemilikan individu (*private ownership*), (2) kepemilikan umum (*public property*), dan (3) kepemilikan negara (*state property*).¹³

- a. Kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memastikan adanya kesempatan bagi pemiliknya –sesuai hukum tersebut- memanfaatkan sesuatu, serta memperoleh kompensasi darinya. Atau izin pembuat syariat (allah SWT) bagi individu untuk memanfaatkan benda. Hak kepemilikan individu merupakan hak syar’i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, misal: mobil, motor, tanah, dan uang tunai. Hak ini dijaga dan diatur oleh syariah islam. Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara’ menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut.¹⁴
- b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-ammah*) adalah izin pembuat syariat (allah SWT) kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda barang. Berbagai benda yang termasuk kategori kepemilikan umum, adalah benda-benda yang dinyatakan pembuat syariat memang diperuntukan bagi suatu komunitas masyarakat, dan allah SWT melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja (*privatisasi*). Benda-benda tersebut terwujud dalam tiga hal berikut:
 - Sesuatu yang termasuk fasilitas umum, ketika tidak tersedia di suatu negara atau suatu masyarakat, maka bisa menimbulkan kekacauan dan sengketa dalam mencarinya. Seperti: air, padang rumput, dan api.¹⁵ Termasuk kepemilikan umum adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, misal: alat pengebor air yang dibutuhkan masyarakat umum, serta pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkannya. Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya.
 - Barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Misalnya, tambang Batu bara, emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya, adalah riwayat abyadh bin hamal al-maziniy, bahwa abyadh meminta kepada

¹³*Ibid* hlm 291

¹⁴ Yan S. Prasetiadi & Wahyu ichsan, 2014 *studi islam paradigma komprehensif* (Bogor: Al azhr fresh zonepublishing)

¹⁵*Ibid* hlm 293

rasulullah saw untuk mengelola tambang garam. Lalu rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada rasul, *'Wahai Rasulullah, tabukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.'* Rasul kemudian berkata, *'tariklah kembali tambang tersebut darinya.'* (HR. At-tarmidzi, no. 1301). Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. Adapun bila sebuah komoditi jumlahnya sedikit dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu, artinya boleh dimiliki pribadi.

- Segala fasilitas yang secara alami tidak bisa dimiliki dan didominasi individu. Seperti: jalan umum, sungai, teluk, laut, danau, mesjid, sekolah-sekolah negeri, dan lapangan umum.¹⁶
- c. Kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*) adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan (diserahkan) kepada khalifah selaku kepala negara. Atau, seluruh harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat dan ijtihad khalifah. Karena itu, harta milik negara merupakan harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, karena sifat harta tersebut yang memang bisa dimiliki secara personal. Namun, harta tersebut kadang terkait sekali dengan hak dan kebutuhan kaum muslim secara umum. Sehingga pengelolaannya menjadi milik negara, dalam hal ini pengelolaannya berdasarkan pandangan dan ijtihad kepala negara.¹⁷

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan strategi yang digunakan pemerintah daerah yaitu Dengan memperbaiki segala kelemahan, antara lain memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produksi yang optimal dalam rangka meraih peluang pasar yang besar. Memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan menghadapi ancaman persaingan yang tinggi dan menipisnya persediaan batubara di dalam negeri. Dalam Manajemen strategik harus bermuara sebagai pengambilan keputusan (merencanakan strategi) yang diikuti perencanaan - Implementasi – pengawasan strategik, supaya organisasi baik bisnis maupun

¹⁶ Yan S. Prasetyadi & Wahyu Ichsan, 2014 *studi islam paradigma komprehensif* (Bogor: Al azhr fresh zonepublishing) hlm 294

¹⁷*Ibid* hlm 295

publik mempunyai keunggulan paripurna. Kemudian dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Saran

Pemerintah dan perusahaan tambang batu bara harus bersinergi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam disertai dengan peningkatan mutu pengelolaan energi sumber daya alam dengan meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan kemudian dukungan terhadap pengembangan pendidikan untuk mengelola sumber daya alam harus dilakukan dengan komprehensif, agar dapat melindungi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Suparmono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral Batubara di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,).
- Prawirosentono Suryadi, primasari Dewi. *Manajemen Strategik & pengambilan keputusan korporasi* (jakarta : PT Bumi Aksara,) 2016
- Prasetiadi Yan S. & Wahyu ichsan, *studi islam paradigma komprehensif* (Bogor: Al azhr fresh zonepublishing)2014
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Prasetiadi Yan S. & ichsan Wahyu, 2014 *studi islam paradigma komprehensif* (Bogor: Al azhr fresh zonepublishing).
- Pongtuluran, Yonathan. *Manajemen sumber daya alam dan lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)
- Pasal I Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Lihat Pasal 17 dan 89 UU P3H
- Lihat di Undang-undang no 4 tahun 2009
- Haryanto M. Tindak Pidana bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>)
- Vevi Dilamartha, yang berjudul “*Dampak Penambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Kecamatan Lawang Kidul*”, 2013.

Agus Purnomo
Ibrahim Hasan

Lugina Mindasari, yang berjudul “*Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT.BA) (PERSERO)TBK-Unit Produksi Ombilin (UPO)Dan Tambang Batubara Tanpa Izin(PETI) Terhadap Kualitas AirSungai Ombilin Sawahlunto.*” 2007.

Elly Puspita, yang berjudul “*Analisa Manajemen Strategik pada PT. Garuda Indonesia Berdasarkan balanced scorecard Tahun 2010-2011*”, tahun 2012

Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian dalam Negeri, *KajianDampakPenambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan diKabupaten Kutai Kartenagara*, laporan penelitian, 2010

<http://distamben.kalselprov.go.id> di kutip hari minggu tgl 12 maret pukul 09:57
WITA

<http://bkpmd.kalselprov.go.id> di kutip hari minggu tgl 12 maret pukul 10:07
WITA